

**STRATEGI KINERJA PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**AKUNTANSI**



**OLEH:**

**MELKIYANUS DANGGA MESA**

**NIM. 2018110179**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
FAKULTAS EKONOMI  
MALANG  
2022**

## **ABSTRAK**

# **STRATEGI KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MALANG**

**Melkiyanus Dangga Mesa<sup>1</sup>, Luh Dina Ekasari<sup>2</sup>, Sri Andika Putri<sup>3</sup>,**  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi Malang.  
E-mail: mikemesa69120@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rencana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Malang. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Wawancara dan laporan keuangan Kabupaten Malang dari tahun 2018-2021 yaitu data yang digunakan. Salah satu jenis analisis data yang dilakukan adalah deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi pengelolaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Malang yaitu membuat tujuan penerimaan pendapatan daerah, ekstensifikasi pendapatan, dan penguatan kelembagaan untuk membuktikan di sisi lain, pengendalian penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas terhadap keuangan daerah adalah strategi pengelolaan belanja daerah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang harus menerapkan sistem perpajakan online dan transparansi laporan keuangan.

***Kata Kunci: Strategi, Belanja daerah, belanja pemerintah, dan pendapatan Daerah***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah, hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan interaksi antara pusat-pusat daerah dengan lembaga pemerintah dan komersial semuanya dipengaruhi oleh Otonomi Daerah (OTDA). Dari "pembangunan daerah" menjadi "pembangunan daerah", paradigma pembangunan telah berkembang dari sentralisasi ke desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, didirikan OTDA. Akibatnya, Indonesia telah memiliki otonomi daerah selama lebih dari sepuluh tahun. Selama ini daerah menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan akhir otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa area yang berkembang ke arah yang benar, tetapi banyak area lain yang masih berjuang untuk ditingkatkan. Otonomi daerah yang memiliki berbagai pengaruh terhadap perekonomian daerah juga dapat menimbulkan masalah anggaran.

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 menyatakan: "Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat."

Otonomi daerah memberikan daerah kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur rumahnya sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komunitas dan otoritas pada akhirnya harus meminta pertanggungjawaban otoritas besar ini.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran dan realisasi yang dilakukan secara murah, efisien, dan efektif jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka akuntabilitas publik (nilai uang). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya merupakan gambaran kualitatif tentang maksud dan tujuan pemerintah daerah, harus diciptakan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu yang harus dicapai pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, ambisi, dan kebutuhan masyarakat, APBD harus dapat menggambarkan kebutuhan pendanaan secara jelas. Oleh karena itu, APBD harus mampu menyajikan gambaran yang akurat tentang kebutuhan dana untuk target tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat pada tahun tertentu. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang beragam dapat memberikan manfaat dan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung hal tersebut.

Kinerja Pemerintah Daerah harus dilihat dengan diukur dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Banyaknya ukuran kinerja yang dicapai suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilannya. Pengelolaan anggaran (APBD) berdasarkan kinerja memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana suatu daerah dapat terus menggali

potensinya untuk meningkatkan pendapatan anggaran, yang akan berdampak pada kapasitasnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan inisiatif pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Banyak bidang perekonomian Malang, antara lain sebagai hotel, tempat hiburan, restoran, dan lain-lain, dialihkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sumber uang terpenting bagi masyarakat miskin Ini bukan PAD; sebaliknya, ini adalah dana perimbangan yang didanai federal. Kontribusi PAD yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah fundamental sepanjang masa otonomi daerah masih sangat minim dibandingkan dengan dana perimbangan ini. Penulis mempertimbangkan untuk mengganti judul “Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang” berdasarkan uraian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan masalah dalam situasi ini sebagai berikut mengingat hal tersebut di atas:

1. Bagaimana Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Strategi Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Peneliti**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Menentukan Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Malang.

## 2. Mempelajari Strategi Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Malang.

### 1.4 manfaat peneliti

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari temuan penelitian yang diantisipasi:

#### 1. Keuntungan Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan pengetahuan teoritis kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian tambahan dengan topik menambah sumber pustaka terkini.

#### 2. Keuntungan praktis

a. Bagi pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah berfungsi sebagai sumber informasi dan ringkasan arah dan taktik ke depan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (APBD).

b. Bagi masyarakat, temuan peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai pendapatan dengan belanja daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana publik.

#### 3. Kebijakan

Temuan peneliti ini dapat menjadi landasan bagi mengembangkan kebijakan untuk pengambilan keputusan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Brian, Sagai 2018. *Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah*, minahasa selatan.
- Halim, Abdul, 2019. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2019. *Analisis laporan keuangan pemerintahdaerah*. UUP STIM YKPN, Yokyakarta.
- Mahmudi, 2018. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Mandey, Dan Rotinsulu. 2020. *Strategi Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belaja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Vol 3. Hal 832*.
- Manullang, 2019 Surya Benediktus, and Syukriy Abdullah. "Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4.1:62-73.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antarah Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Saputra, Dkk, 2018. *Strategi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana*.
- Sagay, Brian, 2018. *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa. Selatan. Vol. 1. Hal 1170*
- Tamasoleng, 2020. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Vol 3. HAL 102*.

Yuwono, S.I.T, Agus, Dan Hariyandi.2018. *Penganggaran Sektor Puplik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing. Malang

Zahrawani, 2019. *Kinerja Pengelolaan Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Kota Pontianak*. Hal.3.